

TINGKAT LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH PADA MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH

Muksal¹, Nevi Hasnita², Putri Nazirah³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
E-mail: ¹ muksal.muksal@ar-raniry.ac.id, ² nevi.hasnita@ar-raniry.ac.id,
³ 190603327@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

This study aims to determine the level of literacy and inclusion of Islamic finance in the city of Banda Aceh after the implementation of Qanun No. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions. This study used a descriptive qualitative method using a questionnaire. The results showed that there was an increase in the Islamic financial literacy level from 71.99% to 89.70% with an Islamic financial inclusion rate of 83.4%. If categorized into financial literacy and inclusion criteria according to Chen and Volpe, the Islamic financial literacy and inclusion of the people of Banda Aceh City are in the high category. As a result of this study's findings, residents of Banda Aceh City should have a better grasp of Islamic financial literacy, expanding their knowledge of topics including budgeting, investing, credit, insurance, and retirement planning. If people are financially literate, they will be better able to make good use of the services and products offered by banks and other financial organizations.

Keywords: *Literacy; inclusion; Islamic Finance; Banda Aceh City*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat Kota Banda Aceh pasca penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan angket. Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan terhadap tingkat literasi keuangan syariah dari 71,99% menjadi 89,70% dengan tingkat inklusi keuangan syariah sebesar 83,4%. Jika dikategorikan kedalam kriteria literasi dan inklusi keuangan menurut Chen dan Volpe maka literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat Kota Banda Aceh berada pada kategori tinggi. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat Kota Banda Aceh tentang literasi keuangan syariah sehingga mereka dapat memahami tentang keuangan yang meliputi manajemen uang, tabungan dan investasi, pinjaman dan hutang, asuransi serta perencanaan pensiun. Literasi keuangan yang baik akan memudahkan masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa lembaga keuangan secara efektif dan efisien.

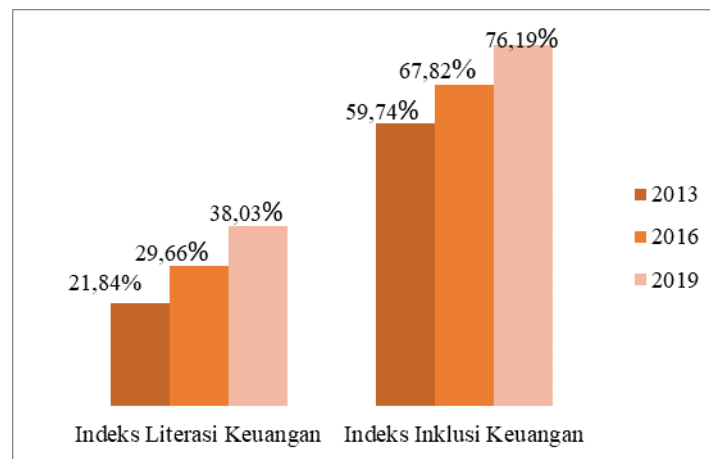
Kata Kunci: **Literasi; Inklusi; Keuangan Syariah; Kota Banda Aceh**

1. PENDAHULUAN

Pemerintah di semua negara memberikan perhatian yang sangat besar terhadap peningkatan edukasi dan literasi keuangan masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan penggunaan atau inklusi keuangan masyarakat. Tingkat literasi dan inklusi yang tinggi akan bermanfaat bagi individu, lembaga keuangan serta negara dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta meningkatkan stabilitas sistem keuangan (Kusumaningtuti Sandriharmy & Setiawan, 2018).

Gambar 1. Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia



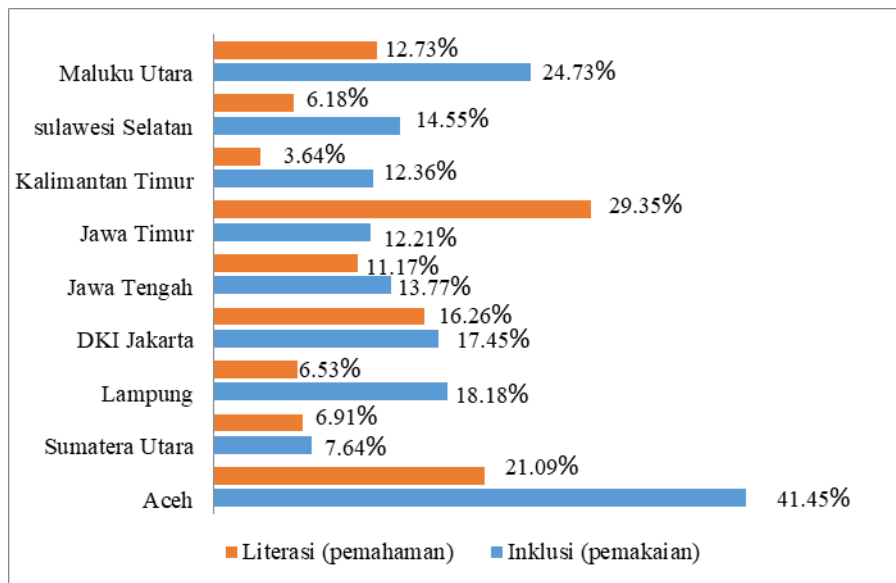
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, (2020), diolah

Pemahaman terhadap literasi keuangan sangat diperlukan agar terciptanya masyarakat yang berkualitas dan memiliki kecerdasan dalam mengelola keuangan serta dapat terhindar dari kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan terjadi bukan hanya karena pendapatan yang rendah, melainkan dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan yang baik (Margaretha & Pambudhi, 2015).

Berdasarkan gambar 1 diatas, survei nasional literasi dan inklusi keuangan yang pertama kali dilakukan oleh OJK pada tahun 2013. Dimana indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia masih tergolong rendah dengan persentase 21,84% dan 59,7%. Hasil survei pada tahun 2016, Indeks literasi keuangan sebesar 29,66% dan indeks inklusi keuangan mencapai 67,82%. Sedangkan hasil survei pada tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%, dibandingkan dengan survei perdana pada tahun 2013 indeks literasi dan inklusi keuangan terus meningkat secara signifikan.

Pemahaman terhadap literasi keuangan selalu dikaitkan dengan inklusi keuangan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh OJK, indeks inklusi keuangan lebih tinggi dibandingkan literasi keuangan yang dimiliki. Hal ini berarti masyarakat Indonesia menggunakan jasa lembaga Keuangan tanpa diikuti dengan literasi yang baik yang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah antara pengguna dan pihak lembaga jasa keuangan.

Gambar 2. Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah-Provinsi



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, (2020), diolah

Berdasarkan hasil survei OJK pada gambar 2 diatas, Aceh memiliki indeks inklusi keuangan syariah tertinggi dari semua daerah di Indonesia, sedangkan indeks literasinya berada pada peringkat ke dua. Dimana 21 dari 100 penduduk Aceh memiliki wawasan dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah, sedangkan 41 dari 100 orang penduduk Aceh telah menggunakan dan memanfaatkan jasa layanan keuangan syariah meskipun belum diimbangi dengan literasi yang baik. Hasil survei OJK dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa rata-rata tingkat inklusi keuangan selalu lebih tinggi dibandingkan tingkat literasi yang dimiliki masyarakat Indonesia. Demikian juga dengan tingkat inklusi keuangan syariah, artinya masyarakat menggunakan produk dan layanan keuangan syariah tanpa diimbangi pengetahuan tentang produk dan layanan jasa keuangan syariah tersebut (OJK, 2017). Perlu dilakukan kajian terhadap persentase tingkat literasi dan inklusi keuangan yang masih berada di bawah 50 persen, seharusnya Provinsi Aceh dimana telah diterapkan Qanun Aceh nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dimana amanat qanun ini bahwa setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Provinsi Aceh harus berprinsipkan syariah, seharusnya lebih tinggi dari tingkat literasi sebesar 21% dan inklusi keuangan sebesar 41.45%.

Kammer et.al. (2015) menyatakan Keuangan syariah memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi, terutama bagi masyarakat muslim yang kurang terlayani dengan sistem keuangan konvensional serta berperan dalam memberikan dukungan bagi UMKM dengan pembiayaan termasuk

fitur bagi hasil. Namun, keuangan Islam masih menghadapi sejumlah tantangan, padahal terdapat banyak potensi dari industri ini yang harus dikembangkan.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh keuangan Islam yaitu dari sisi regulator, ketika para regulator telah menetapkan berbagai standar teknis dan panduan dalam menjalankan keuangan Islam, namun hanya diterapkan oleh beberapa negara saja. Hal ini dikarenakan industri keuangan masih didominasi oleh peraturan dan kerangka pengawasan sistem keuangan konvensional. Sehingga sangat penting meningkatkan interaksi antara regulator standar Islam dengan regulator nasional dalam memastikan kejelasan regulasi bagi pengguna keuangan Islam, serta memastikan keuangan Islam dapat berkontribusi dalam keuangan nasional seperti keuangan konvensional (ESCAP, 2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khalily (2016) terdapat hubungan positif antara regulasi atau peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Bangladesh dengan peningkatan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Peraturan yang menyeluruh dan inisiatif tentang keuangan syariah yang diambil oleh lembaga pemerintah dan swasta berpengaruh positif terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah di Malaysia (World Bank, 2018).

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan diberikan otonomi khusus untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Dengan adanya otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat, masyarakat Aceh yang mayoritas penduduknya beragama Islam menginginkan segala bentuk muamalah yang dilakukan di Aceh sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya pemikiran tersebut pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun atau perda untuk mendukung terlaksananya syariat Islam secara kaffah di Aceh (Usman et al., 2020).

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan salah satu komitmen Pemerintah Aceh dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang maslahat. Qanun ini merupakan hasil tindak lanjut dari Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yang secara tegas telah mewajibkan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga saat ini semua lembaga keuangan di Aceh telah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah (Junaedi et al., 2020).

Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 memberikan dampak positif dalam dua bentuk, yaitu pelaksanaan syariat Islam secara lebih meluas dalam kehidupan

bermasyarakat serta meningkatkan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah baik di Aceh maupun di Indonesia. Dalam simulasi perhitungan oleh Bank Indonesia, dampak dari konversi lembaga keuangan syariah di Aceh akan menaikkan pangsa pasar Perbankan Syariah nasional dari 5,79% menjadi 6.10% (KNEKS, 2020).

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh, sebagai pusat pemerintahan Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2020 sebesar 252.899 jiwa yang terbagi kedalam 9 kecamatan, dengan jumlah angkatan kerja sebesar 131.147 jiwa dimana terdapat 118.637 jiwa yang bekerja (BPS, 2020). Sebagai pusat kegiatan ekonomi, literasi dan inklusi keuangan menjadi topik penting dalam meningkatkan pertumbuhan sektor keuangan yang berperan dalam meningkatkan ekonomi kota dan meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat.

Penelitian tentang tingkat literasi keuangan syariah terhadap masyarakat Kota Banda Aceh pernah dilakukan oleh Rahmaton Wahyu (2019) menemukan bahwa secara keseluruhan tingkat literasi keuangan syariah masih tergolong dalam kategori sedang dengan skor rata-rata 71,99% untuk 4 aspek yakni pengetahuan keuangan dasar syariah, tabungan dan pinjaman syariah, asuransi syariah serta investasi syariah, sedangkan penelitian ini ingin melihat sejauh mana tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah Masyarakat Kota Banda Aceh pasca penerapan Qanun No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini dapat mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Kota Banda Aceh tentang literasi keuangan syariah meliputi manajemen uang, tabungan dan investasi, pinjaman dan hutang asuransi serta perencanaan pensiun. Serta mengetahui seberapa tingkat inklusi keuangan pada masyarakat Kota Banda Aceh pasca implementasi Qanun No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Provinsi Aceh. Penelitian ini juga penting dilakukan guna menganalisa sejauh mana peran pemerintah dalam hal ini terhadap penerapan Qanun LKS dalam meningkatkan tingkat literasi dan keuangan syariah di Provinsi Aceh.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan lapangan (*field research*)

yaitu penelitian survei dengan menyebarkan pertanyaan dalam bentuk kuesioner kepada responden sebagai instrumen penelitian.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Banda Aceh karena Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang merupakan pusat perekonomian. Sebagai pusat kegiatan ekonomi, literasi dan inklusi keuangan menjadi topik penting dalam meningkatkan pertumbuhan sektor keuangan dan berperan dalam meningkatkan ekonomi kota serta meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat.

3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Selain menggunakan data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder dari berbagai sumber untuk melengkapi data dalam penelitian.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merupakan masyarakat Kota Banda Aceh yang sudah dibatasi oleh penulis yaitu masyarakat yang berumur 20 tahun sampai 49 tahun, dikarenakan pada rentang umur tersebut individu sudah memiliki KTP dan dapat dikategorikan sebagai orang dewasa. Pada rentang umur tersebut individu telah memasuki dunia perkuliahan yang tentunya sudah memiliki pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dan sebagian dari mereka sudah memiliki pendapatan sehingga lebih banyak berinteraksi dengan masalah keuangan.

Dalam menentukan besar sampel penelitian dari populasi, peneliti menggunakan rumus slovin. jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 130 responden untuk menghindari data yang diterima cacat atau tidak dikembalikan oleh responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster sampling dimana pengambilan sampel dilakukan berdasarkan area atau kelompok.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan angket atau kuesioner. Angket disebarkan menggunakan dua cara yakni offline dan online. Pengumpulan data secara online dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dalam bentuk link yang telah dibuat menggunakan google form sedangkan pengumpulan data secara offline dilakukan dengan cara membagikan langsung hard copy kuesioner kepada responden.

3.5. Variabel Penelitian

Variabel pada penelitian ini berupa literasi keuangan (manajemen uang, tabungan dan investasi, pinjaman dan utang, asuransi dan perencanaan pensiun) sedangkan untuk inklusi keuangan menggunakan variabel dari Peraturan Presiden no. 82 tahun 2016 tentang SNKI yaitu dimensi akses, dimensi penggunaan dan kualitas. Variabel-variabel ini diukur dengan rata-rata persentase jawaban responden yang benar dari 30 pertanyaan pilihan berganda. Metode pengukuran yang digunakan adalah *scoring* atau penilaian berdasarkan banyaknya jumlah jawaban yang dijawab benar.

3.6. Metode Analisa Data

Analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah menganalisis dan menggambarkan data dari hasil jawaban kuesioner yang telah disebarakan kepada responden. Menurut Chen dan Volpe (1998) dalam Wulandari (2019) penentuan tingkat literasi dan inklusi keuangan ditentukan dengan rumus :

$$\text{Penentuan Kategori} = \frac{\text{Jumlah Jawaban Benar}}{\text{Jumlah Pertanyaan}} \times 100 \%$$

Hasil perhitungan tersebut akan dibandingkan dengan kriteria tingkat literasi dan inklusi keuangan menurut Chen dan Volpe, yaitu:

- a. Tinggi, Jika tingkat literasi dan inklusi lebih dari 80%
- b. Menengah, jika tingkat literasi dan inklusi keuangan berkisar antara 60% sampai 79%
- c. Rendah, jika tingkat literasi dan inklusi keuangan dibawah 60%.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data Responden

4.1.1. Perwakilan Responden Per Kecamatan

Berdasarkan hasil dari pengumpulan kuesioner tabel berikut menyajikan data responden berdasarkan kecamatan:

Tabel 1. Persentase Responden Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Jumlah	Persentase
Baiturrahman	13	11.11%
Banda Raya	13	11.11%

Jaya Baru	13	11.11%
Kuta Alam	13	11.11%
Kuta Raja	13	11.11%
Lueng Bata	13	11.11%
Ulee Kareng	13	11.11%
Meuraxa	13	11.11%
Syiah Kuala	13	11.11%
Total	117	100%

Sumber: Hasil Pengolahan data Primer, (2021).

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat jumlah responden di setiap kecamatan adalah 13 orang, hal ini dilakukan agar jumlah responden di setiap kecamatan yang ada di Banda Aceh sama yakni 11,11%, sehingga dapat mewakili anggota populasi. Dengan demikian dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan menyeluruh di setiap kecamatan Kota Banda Aceh.

4.1.2. Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil dari pengumpulan kuesioner tabel berikut menyajikan data responden berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 2. Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	37	31.6%
Perempuan	80	68.4%
Total	117	100%

Sumber: Hasil Pengolahan data Primer, (2021).

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa responden laki-laki sebanyak 31.6% dari jumlah keseluruhan responden atau sebanyak 37 orang sedangkan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 68.4% dari jumlah keseluruhan responden atau sebanyak 80 orang. Dari data yang tersaji diatas dapat dilihat bahwa responden pada penelitian ini lebih banyak yang berjenis kelamin perempuan dibandingkan yang berjenis kelamin laki-laki.

4.1.3. Usia

Berdasarkan hasil dari pengumpulan kuesioner tabel berikut menyajikan data responden berdasarkan usia:

Tabel 3. Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Usia	Jumlah	Persentase
20 - 24 Tahun	35	29.9%
25 – 29 Tahun	15	12.8%
30 – 34 Tahun	14	12.0%
35 – 39 Tahun	27	23.1%

40 – 44 Tahun	10	8.5%
45 – 49 Tahun	16	13.7%
Total	117	100%

Sumber: Hasil Pengolahan data Primer, (2021).

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat Kota Banda Aceh yang menjadi responden berdasarkan umur adalah 29.9% atau kelompok usia terbanyak yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah kelompok umur yang berusia antara 20 – 24 tahun. Selanjutnya sebanyak 23.1% kelompok yang berusia antara 35 – 39 tahun, 13,7% kelompok yang berusia antara 45 – 49 tahun, 12.8% kelompok yang berusia antara 25 – 29 tahun, dan 12% kelompok yang berusia antara 30 – 34 tahun, serta 8,5% adalah kelompok yang berusia antara 40 – 44 tahun.

4.1.4. Pendidikan Terakhir

Berdasarkan hasil dari pengumpulan kuesioner tabel berikut menyajikan data responden berdasarkan usia:

Tabel 4. Persentase Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SMA	54	46.2
D III	15	13.8
S I	42	35.9
S II	6	5.1
Total	117	100%

Sumber: Hasil Pengolahan data Primer, (2021).

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Kota Banda Aceh yang menjadi responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA dengan persentase 46.2% dari total responden, lalu disusul dengan kelompok pendidikan terakhir S I dengan persentase 35.9% dari total responden. Responden dari kelompok pendidikan D III sebanyak 13.8% dari total responden sedangkan kelompok pendidikan S II menjadi kelompok terendah dengan persentase 5.1% dari total responden dalam penelitian ini.

4.1.5. Pendapatan

Berdasarkan hasil dari pengumpulan kuesioner tabel berikut menyajikan data responden berdasarkan pendapatan perbulan:

Tabel 5. Persentase Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendapatan	Jumlah	Persentase
<Rp1.000.000	39	33,3%
Rp1.100.000– Rp3.000.000	29	24,8%
Rp3.100.000 – Rp5.000.000	26	22,2%

Muksal, Nevi, Putri
Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah pada
Masyarakat Kota Banda Aceh

Rp5.1000.000 – Rp10.000.000	13	11,1%
>Rp10.000.000	10	8,5%
Total	117	100%

Sumber: Hasil Pengolahan data Primer, (2021).

Berdasarkan tabel 5 masyarakat Kota Banda Aceh yang memiliki pendapatan perbulan <Rp1.000.000 menjadi kelompok responden dengan pendapatan terbanyak dengan persentase 33,3% dari total responden, kemudian kelompok dengan pendapatan Rp1.100.000– Rp3.000.000 dengan persentase 24,8% dari total responden. Kelompok dengan pendapatan Rp3.100.000 – Rp5.000.000 memiliki persentase 22,2% dari total responden, kemudian kelompok dengan pendapatan Rp5.1000.000 – Rp10.000.000 memiliki persentase 11,1% dari total responden sedangkan kelompok dengan pendapatan >Rp10.000.000 menjadi kelompok dengan persentase terendah yakni 8,5% dari total responden.

4.1.6. Pekerjaan

Berdasarkan hasil dari pengumpulan kuesioner tabel berikut menyajikan data responden berdasarkan pekerjaan:

Tabel 6. Persentase Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Mahasiswa/i	49	41.9%
Karyawan/Buruh	29	24.8%
PNS/Honoror	17	14.5%
Wirausaha	7	6%
IRT	13	11,1%
Lainnya	2	1.7%
Total	117	100%

Sumber: Hasil Pengolahan data Primer, (2021).

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat pekerjaan masyarakat Kota Banda Aceh dari 117 responden yang terbanyak adalah mahasiswa/i dengan persentase 41.9% dari total responden. 24,8% memiliki pekerjaan sebagai karyawan/buruh, 14.5% bekerja sebagai PNS/Honoror, 11,1% memiliki pekerjaan sebagai IRT, 6% memiliki pekerjaan sebagai wirausaha sedangkan 1,7% memiliki pekerjaan lainnya.

4.2. Deskripsi Variabel Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Hasil penelitian tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat Kota Banda Aceh secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Secara Keseluruhan

Statistik Descriptive	Literasi Keuangan %	Inklusi Keuangan %
Minimum	30	58
Maximum	100	100
Mean	89,70	83,54

Sumber : Hasil Pengolahan data Primer, (2021).

Berdasarkan tabel 7 nilai literasi keuangan terendah yang diperoleh oleh responden adalah 30% dan nilai tertinggi adalah 100%, sedangkan untuk inklusi keuangan nilai terendah yang diperoleh oleh responden adalah 58% dan nilai tertinggi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa ada responden yang hanya mampu menjawab 6 pertanyaan dari total 20 pertanyaan tentang literasi keuangan syariah yang diberikan dan terdapat responden yang memberikan nilai total 5,8 dari 10 pertanyaan tentang inklusi keuangan syariah.

Nilai tertinggi adalah responden yang mampu menjawab semua pertanyaan tentang literasi keuangan syariah dengan benar dan inklusi keuangan syariah dengan skor maksimum adalah 100%. Rata-rata (mean) responden berhasil menjawab pertanyaan tentang literasi keuangan syariah dengan benar sebanyak 89,70% sedangkan responden yang menjawab pertanyaan tentang inklusi keuangan syariah dengan skor maksimum sebanyak 83,4%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat Literasi Keuangan syariah masyarakat Kota Banda Aceh tergolong dalam kategori tinggi ($>80\%$), sedangkan untuk tingkat inklusi keuangan syariah masyarakat Kota Banda Aceh juga tinggi ($>80\%$)

Tabel 8. Tingkat Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Masyarakat Kota Banda Aceh

Kategori	Literasi Keuangan		Inklusi Keuangan	
	Jmlh	Persentase %	jmlh	Persentase %
Rendah	5	4,3	1	0,9
Sedang	12	10,3	24	20,5
Tinggi	100	85,5	92	78,6
Total	117	100	117	100

Sumber: Hasil Pengolahan data Primer, (2021).

Berdasarkan tabel 8 dapat disimpulkan bahwa dari 117 masyarakat Kota Banda Aceh yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 85,5% dari total responden memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi, 10,3% memiliki tingkat literasi

keuangan syariah sedang dan 4,3% lain memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang rendah. Sedangkan untuk tingkat inklusi keuangan syariah hanya 0,9% atau 1 orang dari responden yang memiliki tingkat inklusi keuangan syariah yang rendah, 20,5% memiliki tingkat inklusi sedang dan 78,6% responden memiliki tingkat inklusi keuangan syariah yang tinggi.

Tinggi rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah juga dapat dilihat dari jumlah responden yang menjawab benar pertanyaan dari setiap aspek dalam menentukan tinggi atau rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah.

4.2. Pembahasan

Literasi keuangan merupakan pengetahuan atau pemahaman individu terhadap keuangan yang menciptakan keyakinan terhadap lembaga keuangan, sehingga mampu mengelola keuangan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup individu di masa yang akan datang, serta terhindar dari kerugian atau *fraud*. Sedangkan inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat dalam menggunakan jasa lembaga keuangan syariah serta ketersediaan akses bagi masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa lembaga keuangan syariah. Maka dari itu sangat penting bagi masyarakat untuk memiliki tingkat inklusi keuangan syariah yang baik disertai dengan tingkat literasi keuangan yang baik pula.

Tabel 9. Persentase Responden Yang Menjawab Pertanyaan Tentang Literasi Keuangan Syariah dengan Benar

Aspek	Pertanyaan	Tingkat Literasi Keuangan Syariah		
		Rendah (<60%)	Sedang (60 –79%)	Tinggi (>80%)
Manajemen uang	Rata-rata			95,16%
	1. Pengelolaan uang yang baik			95,73%
	2. Perencanaan anggaran			98,29%
	3. Pengelolaan uang tunai			91,45%
Tabungan dan investasi	Rata-rata			88,16%
	1. Produk tabungan			93,16%
	2. Pembagian keuntungan			88,03%
	3. Manfaat tabungan mudarabah		70,09%	
	4. Produk investasi syariah			87,18%
	5. Konsep risiko dalam investasi			95,73%
	6. Pengetahuan tentang reksadana			83,76%
7. Pengetahuan tentang investasi jangka			99,15%	

	panjang			
Pinjaman dan hutang	Rata-rata			83,33%
	1. Produk pembiayaan LKS			85,47%
	2. Metode pengambilan keuntungan			81,20%
Asuransi Syariah	Rata-rata			89,57%
	1. Prinsip asuransi syariah			94,87%
	2. Manfaat menggunakan asuransi syariah			85,47%
	3. Produk Asuransi Syariah			94,87%
	4. Pengetahuan tentang risiko asuransi syariah			88,89%
	5. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional			83,76%
Perencanaan pensiun	Rata-rata			92,31%
	1. Perencanaan pensiun			96,58%
	2. Jenis dana pensiun			88,89%
	3. Manfaat dari perencanaan pensiun			91,45%

Sumber: hasil pengolahan data primer, (2021).

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan persentase responden dengan jawaban yang benar dari setiap aspek pertanyaan tentang literasi keuangan syariah, setiap aspek dalam literasi keuangan memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi. Aspek manajemen uang memiliki rata-rata persentase jawaban responden yang benar yaitu 95,16% juga merupakan persentase yang tertinggi dibandingkan aspek lainnya, aspek tabungan dan investasi memiliki persentase rata-rata 88,16%.

Aspek pinjaman dan hutang memiliki responden dengan jawaban benar dengan persentase rata-rata 83,33% dimana pada aspek ini memiliki persentase yang lebih rendah dari aspek lainnya, namun pada aspek ini masih tergolong ke dalam tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi. Pada aspek asuransi syariah memiliki responden dengan tingkat jawaban benar dengan persentase rata-rata 89,37% sedangkan pada aspek perencanaan pensiun memiliki persentase rata-rata 92,31% hal ini menandakan bahwa rata-rata responden telah mengetahui dengan baik tentang perencanaan pensiun yang akan bermanfaat bagi mereka dimasa yang akan datang.

Tabel 9 menunjukkan bahwa tingkat literasi yang sedang terdapat pada aspek tabungan dan investasi pada pertanyaan tentang manfaat tabungan mudarabah dengan persentase 70,09%. Tabungan mudarabah merupakan tabungan yang menggunakan akad mudarabah yang sering digunakan dalam perbankan, rata-rata produk tabungan pada perbankan syariah menggunakan akad ini, namun masih ada pengguna produk

tabungan perbankan syariah yang belum memahami dengan benar tentang konsep akad mudarabah tersebut.

Tabel 10. Persentase Responden Yang Menjawab Pertanyaan Tentang Inklusi Keuangan Dengan Benar

Aspek	Pertanyaan	Tingkat Inklusi Keuangan Syariah		
		Rendah (<60%)	Sedang (60 –79%)	Tinggi (>80%)
Akses	Rata-rata			86,67%
	1. Lokasi lembaga keuangan syariah			90,77%
	2. Mengetahui layanan keuangan yang dimiliki bank syariah			87,18%
	3. Layanan jasa keuangan syariah			82,82%
	4. Ketersediaan ATM			85,90%
Pergunaan	Rata-rata			82,56%
	1. Penggunaan produk lembaga keuangan syariah		79,74%	
	2. Penggunaan kartu debit syariah			82,82%
	3. Penggunaan <i>mobile/ internet banking</i>			80,00%
	4. Penggunaan uang elektronik			87,69%
Kualitas	Rata-rata			84,36%
	1. Meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan			81,28%
	2. Merasakan manfaat dari produk dan jasa lembaga keuangan syariah			87,44%

Sumber: hasil pengolahan data primer, (2021).

Pada tabel 10 menjelaskan persentase jawaban responden yang menjawab pertanyaan dengan skor maksimum, diketahui bahwa untuk semua aspek dalam inklusi keuangan syariah dapat dikategorikan ke dalam tingkat inklusi yang tinggi. Pada aspek akses memiliki persentase 86,67%, aspek penggunaan memiliki persentase 82,56% sedangkan untuk aspek kualitas memiliki persentase 84,36%.

Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat Kota Banda Aceh tergolong ke dalam kategori tinggi, di mana tingkat literasi keuangan syariah memiliki persentase 89,70% sedangkan tingkat inklusi keuangan syariah memiliki persentase 83,4%. Hal ini didukung dengan Perda atau Qanun No.11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, dimana poin penting dari qanun yang telah diberlakukan mulai 4 Januari 2019 ini adalah semua jenis lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh diharuskan sesuai dengan syariah yang berlaku dan semua lembaga keuangan diharuskan untuk menyesuaikan dengan qanun ini selambat-lambatnya selama 3 tahun setelah qanun diberlakukan. Hal ini menyebabkan peningkatan pangsa pasar Lembaga

Keuangan Syariah terutama Perbankan Syariah baik secara nasional maupun di Aceh.

Berdasarkan acuan dari Chen dan Volpe (1998), apabila skor literasi dan inklusi keuangan berada >80% maka tingkat literasi dan inklusi keuangan berada pada kategori tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat Kota Banda Aceh berada pada kategori tinggi. Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah yang tinggi di sebabkan oleh adanya penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, dimana hasil wawancara singkat dengan beberapa responden menyatakan dengan penerapan qanun tersebut mau tidak mau mereka melakukan konversi segala bentuk produk dan jasa keuangan yang dimiliki sebelumnya menjadi produk dan jasa keuangan syariah. Pada saat melakukan konversi beberapa dari responden menanyakan tentang produk dan jasa keuangan syariah terutama perbankan syariah sehingga menambah pengetahuan mereka tentang lembaga keuangan syariah.

Beberapa responden yang berprofesi sebagai pedagang/wirausaha menyatakan bahwa dengan diberlakukan qanun tentang LKS tersebut membuat mereka sulit dalam proses pembelian barang dari luar Aceh, seperti sering terjadinya uang sudah di transfer tetapi belum masuk ke rekening penerima karena supplier di luar Aceh masih menggunakan perbankan konvensional sehingga menghambat transaksi, serta adanya biaya transfer antar bank syariah dan konvensional.

Responden yang menggunakan jasa lembaga keuangan lainnya menggunakan lembaga keuangan seperti BMT, dimana mereka menyatakan bahwa lembaga keuangan ini lebih sederhana dan mudah dalam transaksinya. Sedangkan beberapa responden yang belum pernah menggunakan lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional dikarenakan usianya yang sudah lanjut usia dan beberapa lainnya dikarenakan pendapatan yang rendah sehingga masih dapat mengelola uang sendiri.

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu (2019), pada 108 warga Kota Banda Aceh yang ternyata memiliki tingkat literasi yang sedang atau dengan persentase 71,99%. Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat Kota Banda Aceh pada penelitian ini mengalami peningkatan dari penelitian sebelumnya. Tingkat literasi keuangan menjadi 89,70% dan tingkat inklusi keuangan syariah yang tidak diukur sebelumnya dengan persentase 83,4%.

5. KESIMPULAN

Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Kota Banda Aceh meningkat dari 71,99% pada tahun 2019 menjadi 89,70% pada tahun 2021 pasca Penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah yang dilihat dari 5 aspek yaitu manajemen uang dengan persentase 95,16%, tabungan dan investasi 88,16%, pinjaman dan hutang 83,33%, asuransi 89,57% serta perencanaan pensiun dengan 92,31%.

Tingkat inklusi keuangan syariah masyarakat Kota Banda Aceh pasca penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah termasuk kedalam kategori tinggi dengan persentase 83,4%. Hal ini dilihat dari 3 dimensi yaitu dimensi akses dengan persentase 86,67%, dimensi penggunaan 82,56%, dan dimensi kualitas dengan 84,36%.

Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah yang tinggi disebabkan oleh adanya penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, dimana dengan penerapan Qanun tersebut setiap nasabah perbankan diharuskan untuk melakukan konversi segala bentuk produk dan jasa keuangan yang dimiliki sebelumnya menjadi produk dan jasa keuangan syariah. Pada saat melakukan konversi beberapa dari responden menanyakan tentang produk dan jasa keuangan syariah terutama perbankan syariah sehingga menambah pengetahuan mereka tentang lembaga keuangan syariah.

Beberapa kendala terhadap Implementasi Qanun tentang LKS dimana terdapat perbedaan rekening nasabah di provinsi Aceh dengan Provinsi lain, sehingga mempersulit bagi para pedagang yang melakukan transaksi antar provinsi, karena sering terjadi masalah transaksi yang terjadi. Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan lembaga keuangan syariah dianggap lebih sederhana dan mudah dalam transaksinya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, B. P. S. K. B. (2020). Kota Banda Aceh Dalam Angka 2020. *Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh*, 2554.
- Bank, W. (2018). *Financial inclusion overview*. World Bank.
- Chen, H., & Volpe, R. P. (1998). An analysis of personal financial literacy among college students. *Financial Services Review*, 7(2), 107–128.
- Ekonomi, K. N. (2020). Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019-2020. *Jakarta: KNEKS*.
- ESCAP, U. N. (2017). *Financial regulatory issues for financial inclusion*.

- Junaedi, I. W. R., SE, M. A., Waruwu, D., Ichsan, S. S., Damayana, I. W., & Th, S. (2020). *Meugoe (Mengembalikan Kemandirian dan Kejayaan Ekonomi Aceh)*. Penerbit CV. SARNU UNTUNG.
- Kammer, M. A., Norat, M. M., Pinon, M. M., Prasad, A., Towe, M. C. M., & Zeidane, M. Z. (2015). *Islamic finance: Opportunities, challenges, and policy options*.
- Khalily, M. A. (2016). *Financial inclusion, financial regulation, and education in Bangladesh*.
- Kusumaningtuti Sandriharmy, S., & Setiawan, C. (2018). *Literasi dan inklusi keuangan Indonesia*. Rajawali Pers.
- Margaretha, F., & Pambudhi, R. A. (2015). Tingkat literasi keuangan pada mahasiswa S-1 fakultas ekonomi. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 17(1), 76–85.
- Usman, M. H., Aswar, A., & Irawan, A. W. (2020). Syariat Islam dan Kemaslahatan Manusia di Era New Normal pada Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan. *FENOMENA*, 12(1), 89–106.
- Wahyu, R. (2019). *Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Kota Banda Aceh*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Wulandari, R. (2019). *Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus pada UMKM Provinsi DKI Jakarta)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uin Jakarta.